



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 07 TAHUN 2005**

### **T E N T A N G**

## **TRANSPARANSI DAN PERTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, aspiratif dan demokratis, perlu memberikan kepada masyarakat untuk berperan seras dalam setiap pengambilan kebijakan public di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dimaksudkan huruf a, serta memenuhi tuntutan dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu adanya transparansi dan partisipasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi , Kolusi

dan nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi manusia;
8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun

2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
18. Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2004 tentang Rencana Teknis Obyek Wisata Parangtritis;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai Dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
Dan  
BUPATI BANTUL

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSPARANSI DAN  
PERTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Bantul;
6. Badan Perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan desa di Kabupaten Bantul ;
7. Lurah desa adalah Lurah dan Pamong desa
8. Publik adalah orang per-orang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional, dan badan hukum;

9. Badan Publik adalah semua lembaga pembuat kebijakan publik yang meliputi :
  - a. DPRD;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Perwakilan Desa;
  - d. Pemerintah Desa;
10. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
11. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
14. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
15. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Transparansi dan Partisipasi publik berasaskan :

- a. keterbukaan melalui informasi publik yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- b. kepatutan , dengan memperhatikan perlindungan hak asasi , pribadi, goilongan, dan rahasia negara;
- c. fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat , tepat waktu, murah dan sederhana , kecuali informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. kemerdekaan berpendap[at mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral;
- e. rasional, efektif dan efisien.

## Pasal 5

Hasil usaha kelompok yang benar-benar bermanfaat bagi penguatan modal kelompok, asa dan kesejahteraan anggota dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## Bagian Kesatu